

Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta

Siti Aisyah^{1*}, Indan Nur Pratiwi²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: sa150@ums.ac.id

Abstrak

Keywords:

Penyerapan Tenaga Kerja; Pengeluaran Pemerintah; PDRB; Upah; Inflasi

This study aims to analyze the effect of government spending, GDRP, minimum wage, inflation and human development index on employment in Surakarta Residency. The analytical method used in this study is panel data regression, which is a combination of cross section data (seven regencies / cities in Surakarta Residency) and time series data for 10 years (2008-2017). The data used was obtained from the official website of the Central Statistics Agency (BPS). Based on the analysis of the Chow Test and the Hausman Test the best model chosen was the Fixed Effect Model (FEM). Using the significance level of 0.10 the result showed that the variable of government expenditure and HDI have a positive and significant effect on employment in Surakarta Residency, while the GDRP, minimum wage, and inflation have no effect on labor absorption in Surakarta in 2008-2017

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tujuan di dalam pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual. Mandat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembangunan nasional fokus pada pembangunan ekonomi tanpa mengesampingkan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan pokok dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara (Wardana, 2014).

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara tidak terlepas dari faktor-faktor yang saling berinteraksi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam

mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri (Pangastuti, 2015).

Arsyad (2009), mengemukakan bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penduduk mempunyai dua peranan penting dalam perekonomian, dalam konteks pasar berada disisi permintaan dan penawaran. Disisi permintaan, penduduk

bertindak sebagai konsumen, sedangkan disisi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen (Dumairy, 1999). Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif didukung oleh kekayaan alam yang beraneka ragam merupakan modal dasar dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia tersebut pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pertambahan jumlah angkatan kerja (Dimas, 2009). Tingginya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai akan menyebabkan pengangguran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel adalah kombinasi antara data silang tempat (*cross section*) yaitu tujuh Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta dengan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2008-2017.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah, PDRB, upah minimum, inflasi dan IPM di Karesidenan Surakarta tahun 2008-2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB, upah minimum, inflasi, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja digunakan alat analisis regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$\log TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PP_{it} + \beta_2 \log PDRB_{it} + \beta_3 \log UMK_{it} + \beta_4 INF_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- TK = Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
- PP =Pengeluaran Pemerintah (ribu rupiah)
- PDRB= Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
- UMK =Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)
- INF = Inflasi (persen)
- IPM =Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
- i = Wilayah di Karesidenan Surakarta
- t = Waktu (tahun 2008-2017)
- β = Koefisien regresi masing-masing variabel
- ε = Variabel pengganggu

Untuk menentukan model estimasi terbaik dari hasil estimasi PLS, FEM, dan REM digunakan uji Chow dan uji Hausman.

a. Uji Chow

Uji Chow adalah uji statistik untuk memilih manakah yang baik antara *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 1. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	366,659674	(6,58)	0,0000
Cross-section Chi-square	256,324121	6	0,0000

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan, nilai probabilitas F sebesar $0,0000 \leq 0,10$ dan *Chi Square* sebesar $0,0000 \leq 0,10$ H_0 ditolak, maka kesimpulannya model yang digunakan FEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Tabel 2. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	166,319940	5	0,0000

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan, nilai p-value sebesar $0,0000 \leq 0,10$, maka H_0 ditolak. Kesimpulannya model yang digunakan adalah FEM.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

$$\log TK_{it} = 11,61961 + 0,049977 \log PP_{it} - 0,003547 \log PDRB_{it} - 0,036358 \log UMK_{it} - 0,000202 \ln f_{it} + 0,012281 IPM_{it}$$

	(0,0702)***	(0,7582)	(0,3047)
	(0,8650)	(0,0021)*	

$R^2 = 0,991812$; DW-Stat. = 1,566626; F-Stat. = 638,6587; Sig. F-Stat. = 0,000000

Keterangan: *signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik.

Tabel 3 menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,9918, yang artinya 99,18% variasi variabel penyerapan tenaga kerja (TK) dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah, variabel PDRB, variabel upah minimum, variabel inflasi dan variabel IPM. Sisanya 0,82% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

d. Uji Kebaikan Model (Uji F)

Dari Tabel 3, terlihat nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik F pada estimasi model sebesar $0,000 < 0,10$, maka H_0 ditolak. Jadi kesimpulannya model yang dipakai eksis.

e. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji validitas pengaruh menguji tingkat signifikansi pengaruh dari variabel independen secara parsial.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	Sig. T	Kriteria	Kesimpulan
Pengeluaran Pemerintah	0,0702	$\leq 0,10$	Signifikan pada $\alpha = 0,10$
PDRB	0,7582	$> 0,10$	Tidak memiliki pengaruh signifikan
Upah Minimum	0,3047	$> 0,10$	Tidak memiliki pengaruh signifikan
Inflasi	0,8650	$> 0,10$	Tidak memiliki pengaruh signifikan
IPM	0,0021	$\leq 0,01$	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan IPM secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel PDRB, upah minimum dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pemerintah secara parsial berhubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2008-2017. Artinya bahwa dalam hal penyerapan tenaga kerja juga memerlukan campur tangan pemerintah dengan memperbesar belanja pemerintah untuk pembangunan.
- 2) PDRB secara parsial berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2008-2017. Hal ini karena kontribusi

sektoral terhadap pembentukan PDRB di Karesidenan Surakarta didominasi sektor industri pengolahan, dimana sektor ini lebih banyak menggunakan mesin-mesin untuk proses produksi.

- 3) UMK secara parsial berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2008-2017. Upah minimum dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan mengurangi proporsi keuntungan yang didapatkan pengusaha. Oleh karena itu kenaikan upah akan membuat pengusaha mengurangi jumlah tenaga kerjanya.
- 4) Inflasi secara parsial berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2008-2017. Kenaikan tingkat inflasi akan menurunkan minat investor untuk melaksanakan investasi sehingga akan berakibat pada menurunnya jumlah penyerapan tenaga kerja.
- 5) IPM secara parsial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta tahun 2008-2017. Hal ini dikarenakan IPM mencakup tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
- 6) Nilai R^2 dalam penelitian ini sebesar 0,991812. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 99,18%. Atau dapat diartikan bahwa 99,18% variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh

variabel pengeluaran pemerintah, PDRB, upah minimum, inflasi dan IPM. Sisanya 0,82% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model regresi tersebut.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. (2010). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- [2] Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- [3] Dimas, & Nenek Woyanti. (2009). *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 16(1), 32-41.
- [4] Ganie, Djupiansyah. (2017). *Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur*. Jurnal Eksekutif, 14(2).
- [5] Arsyad, L. (2000). *Pengantar Perencanaan Pengembangan Perekonomian Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- [6] Arsyad, L. (2009). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- [7] Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- [8] Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- [9] Kaufman, Bruce. (2000). *The Economic of Labor Markets, Fifth Edition*. New York: The Dryden Press.